BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 215 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN NAGREG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nagreg untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nagreg untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Nagreg serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Nagreg adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Nagreg untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Kecamatan Nagreg Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Nagreg Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Kecamatan Nagreg Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Kecamatan Nagreg untuk melaksanakan rencana kerja Kecamatan Nagreg.
(2) Renja Kecamatan Nagreg Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Nagreg tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Nagreg;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Kecamatan Nagreg dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Nagreg;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Nagreg yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Nagreg digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA.

(2) Renja Kecamatan Nagreg selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Kecamatan Nagreg Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA KECAMATAN NAGREG

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Nagreg Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan Nagreg tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Nagreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN NAGREG

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Nagreg menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Kecamatan Nagreg meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Nagreg sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nagreg;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Nagreg dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan Nagreg.

Pasal 7

(1) Kecamatan Nagreg membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Kecamatan Nagreg.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Kecamatan Nagreg disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Kecamatan Nagreg tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Camat Kecamatan Nagreg melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Nagreg dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Nagreg sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Nagreg terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Kecamatan Nagreg.

(3) Camat Kecamatan Nagreg menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Kecamatan Nagreg.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Nagreg dilakukan pada saat penyusunan RKA.

BAB V
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN NAGREG

Pasal 9

(1) Renja Kecamatan Nagreg dapat diubah apabila:
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD;
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Nagreg beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Nagreg Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Nagreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari:
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Kecamatan Nagreg tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 215

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 215 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
NAGREG TAHUN 2026

RENCANA KERJA KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tugas kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari atributif, delegatif dan tugas pembantuan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya pelayanan publik yang efektif dan efisien, dalam konteks tersebut, upaya optimalisasi pembangunan memerlukan perencanaan yang mampu merefleksikan penyelesaian berbagai permasalahan melalui strategi dan kebijakan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan serta dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum, sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah kecamatan. Dengan kedudukan tersebut, kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, serta sumber pembiayaannya.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan tersebut merupakan sebagian dari

kewenangan bupati/walikota kepada camat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah, kecamatan dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya pelayanan tersebut, kecamatan merupakan etalase yang mencerminkan pelayanan daerah kabupaten, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan harus memiliki perencanaan dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Dalam pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kecamatan Nagreg sesuai dengan Renstra tahun 2025-2029 telah memiliki tujuan, sasaran dan Indikator Utama (IKU) yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nagreg dengan memperhatikan tujuan, sasaran, dan indikator yang tercantum didalam Renstra dimaksud.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nagreg tahun 2026 sebagai bagian dari Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan hasil dari koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPERIDA untuk mencapai tujuan dan target sesuai dengan target Renstra yang merupakan bagian dari Renja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2030.

Kecamatan Nagreg sebagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam berkontribusi terhadap capaian daerah dengan visi Kabupaten Bandung yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju, Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” dengan misi nomor 3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”.

Sebagai bagian dari perencanaan, Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Nagreg tahun 2026 disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada, serta perlu adanya penanganan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi optimal dan mendukung terhadap tugas atributif yang diemban kecamatan serta dalam rangka menjalankan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari bupati kepada camat.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahannya

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah Kabupaten Bandung.

Sesuai dengan keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.479-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, yang dimana terdapat 16 urusan, dan 28 rincian pelimpahan dengan pelimpahan berupa pelaksanaan, koordinasi, rekomendasi, pembinaan, dan fasilitasi (perizinan dan non perizinan).

Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja, guna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja, rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dan strategis, serta merupakan proses perencanaan sehingga menjadi variabel yang sangat strategis dalam perencanaan. Disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nagreg tahun 2026 disusun berdasarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta target yang akan dicapai, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan menyelaraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD), sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2015 Nomor 2037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 147 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 83);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk

Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 76);

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 2023 Nomor 120);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);
30. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nagreg tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penyusunan dokumen perencanaan tahun 2026;
2. Sebagai pedoman dan arah melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan prioritas Kabupaten Bandung;
3. Sebagai tolak ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Nagreg.

1.4. Mekanisme Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan rencana kerja (Renja) Kecamatan Nagreg, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Kecamatan Nagreg yang berisi proses penyusunan Renja Kecamatan Nagreg dan keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Nagreg Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Nagreg.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Nagreg serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Nagreg Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Nagreg

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagreg

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nagreg

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hal-hal apa saja yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nagreg.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Nagreg

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nagreg.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Nagreg

Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya adalah tahun 2024 dikarenakan pada saat penyusunan Renja tahun 2026, tahun berjalan adalah tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dimaksudkan untuk melakukan penilaian sekaligus analisa terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nagreg. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Nagreg tahun 2016-2021. Evaluasi hasil capaian kinerja terhadap rencana kerja tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 didasarkan pada DPA Kecamatan Nagreg 2024 dengan memperhatikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 dan evaluasi tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkat nya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggara an Pelayanan Publik	Nilai AKIP	90,00 Poin	90,15 Poin	101,17%
			BMD dalam Keadaan baik/layak pakai	80,00%	85,00%	106,25%
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai IKM	76,00 Poin	77,40 Poin	101,84%
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat berkembang	4 Desa	4 Desa	100,00%

(Sumber LKIP Nagreg tahun 2024)

Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2025-2030. Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2026.

Secara umum Kecamatan Nagreg telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2030. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2030 sebanyak dua sasaran. Tahun 2026 adalah tahun ke-satu pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan dari dua sasaran strategis dengan dua Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) yang sekaligus sebagai perjanjian kinerja pada tahun 2026. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah 2004 s/d tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 (TC-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 s/d Triwulan I TA 2025 Kecamatan Nagreg

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)=(7/6)	-9	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Nagreg									
07.01	Kecamatan									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip	79 Poin	75 Poin	76 Poin	77 Poin	101%	78 Poin	78 Poin	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	300%	100%	100%	100%	100%	400%	100%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	13 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%

7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	0 Laporan	0%
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	0 Laporan	0%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	300%	100%	100%	100%	100%	400%	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tujangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/bln	28 Org/bln	26 Org/bln	26 Org/bln	100%	26 Org/bln	26 Org/bln	100%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	100%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	12 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	3 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	300%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	296 Orang	148 Orang	37 Orang	37 Orang	100%	37 Orang	185 Orang	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	100%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket	63 Paket	21 Paket	21 Paket	100%	21 Paket	84	100%
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	100%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	6 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	10 Paket	8 Paket	100%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	16 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	20 Paket	100%
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65 Dokumen	52 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	13 Dokumen	55 Dokumen	100%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Dokumen	3 Dokumen	-	0 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	100%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	12 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	1 Paket	19 Paket	100%

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	300%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	100%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	300%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Peralatan	4 Peralatan	2 Peralatan	2 Peralatan	100%	7 Peralatan	2 Peralatan	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	2 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	3 Gedung	75%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	90 Poin	90 Poin	90 Poin	90 Poin	101%	90 Poin	90 Poin	100%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	300%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 LK	5 LK	5 LK	5 LK	100%	100%	10 LK	200%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 LK	3 LK	1 LK	1 LK	100%	1 LK	4 LK	100%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 LK	3 LK	1 LK	1 LK	100%	1 LK	4 LK	100%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	4 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	100%
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	100%

7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	-	100%	-	100%	100%	100%
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	100%
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	100%
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	100%
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	z50 Keluarga	0 Keluarga	100%
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	100%
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	100%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	100%
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	100%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	100%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	650 Orang	450 Orang	150 Orang	150 Orang	100%	150 Orang	600 Orang	100%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 LK	4 Dokumen	100%
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-						
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	7 Dokumen	100%
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								

7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	100%

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi program yang menunjang terhadap kinerja utama dari Tabel 2.2 di atas memberikan gambaran sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Pada realisasi program, kegiatan dan subkegiatan telah memenuhi capaian kinerja meskipun dalam realisasinya terdapat faktor penghambat yang perlu diadakannya koordinasi dan kolaborasi terutama dalam pelaksanaan yang bersifat delegatif.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Dari sisi penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai 98% realisasi program kegiatan/subkegiatan telah berjalan sesuai perencanaan dan telah sesuai target program dan kegiatan (*outcome*) maupun kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagreg

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Nagreg pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Indikator–indikator tersebut merupakan target dari capaian indikator sasaran dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Nagreg sebagai sebagai salah satu perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintah kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, capaian

kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan–perubahan yang terjadi, sehingga dari indikator tersebut dapat diukur sejauh mana capaian kinerja dalam pelaksanaan program maupun kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi kesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian kinerja, sehingga capaian kinerja yang diperoleh dari hasil kerja dan kinerja perangkat daerah merupakan implementasi dari sebuah perencanaan.

Analisis kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja, terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

Analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Nagreg merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada Tabel 2.2 mengenai pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Nagreg.

Tabel 2.3 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Nagreg
Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indek Kepuasan Masyarakat			85	86	89	90	90,15	90,50	91	92	Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi capaian realisasi yang melebihi target sejalan dengan optimalisasi pelayanan melalui inovasi Nagreg Cerdas, sehingga target untuk tahun 2023 sudah tidak relevan. Namun demikian, target masih tetap, dikarenakan belum dilakukan perubahan kedua pada Renstra tahun 2021-2026, dan untuk realisasi tahun 2025 belum ada dikarenakan laporan IKM dilakukan pada akhir tahun atau bulan Desember pada aplikasi e-SKM Kab Bandung
3	Nilai AKIP			72	73	75	78	77,35	78	76	75	Dengan adanya monev internal, pelaksanaan program kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan tiap triwulan, capaian nilai AKIP tahun 2024 telah melampaui target, dan untuk realisasi tahun 2025 belum ada dikarenakan belum dilaksanakan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
4	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik			65%	70%	75%	80%	65%	75%	75%	80%	Dengan adanya pendataan dan penertiban aset serta pengadaan pada tahun 2022, target Aset dalam keadaan baik realisasi tercapai sesuai target

5	Desa Beradministrasi baik			100%	100%	100%	100%	NA	-	100%	100%	Capaian kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi bantuan keuangan desa serta pembinaan administrasi desa telah berkontribusi terhadap tercapainya realisasi target

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

1. Kinerja Kecamatan Nagreg

Kinerja pelayanan di Kecamatan Nagreg telah berjalan sesuai dengan perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi internal yang telah dilaksanakan dengan adanya rapat koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik.

Hal–hal kritis kaitan dengan pelayanan adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan dari bupati kepada Camat Nagreg berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : ..... yang terdiri dari 30 kewenangan dan 320 rincian pelimpahan, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
b. Pelaksanaan pelayanan publik langsung terhadap masyarakat antara lain:
    1. Non perizinan (fasilitasi penerbitan KK, KTP dan administrasi kependudukan lainnya).
    2. Melaksanakan program kewilayahan.
    3. Menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat kaitan dengan pelayanan.
    4. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat melalui kuesioner Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. Permasalahan dan hambatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi camat sebagai implementasi dari tugas kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil, guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

Adapun permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

a. SDM aparatur;

b. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang menginginkan kecepatan, ketepatan, kesesuaian biaya dan berkeadilan.
c. Tingkat Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari bupati kepada camat belum optimal dilaksanakan;
d. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan;
e. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
f. Belum optimalnya koordinasi di tingkat dinas/badan dengan kecamatan;
g. Permasalahan sampah belum terkelola dengan baik
h. Jauhnya jarak pusat pelayanan di kabupaten dengan Kecamatan Nagreg;
i. Adanya kegiatan galin C quari tanah;
j. Belum adanya sarana dan prasarana umum untuk kegiatan aktivitas warga (olahraga, *refreshing* dan kegiatan lainya) berupa taman alun–alun;
k. Belum adanya pasar tradisional dan sehat.

Adapun hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

a. Budaya kerja belum sepenuhnya optimal masih terdapat budaya kerja konvensional;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlum tersusun secara benar dan belum teraplikasinya pada seluruh bidang kegiatan;

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi internal secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan

sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan.

4. Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

Pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari adanya kekuatan, kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada.

a. Kekuatan (*Streng*)
   1. Adanya dukungan anggaran;
   2. SDM aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik;
   3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
   4. Sinergitas dan soliditas aparatur.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)
   1. Sarana dan prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru;
   2. Kapasitas SDM Aparatur;
   3. Tidak adanya sarana publik yang memadai (RTH).

c. Peluang (*Opportunities*)
   1. Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
   2. Antusiasme masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, akta kelahiran dan kartu identitas anak);
   3. Koordinasi dengan pemerintah desa masih terjalin dengan baik.

d. Tantangan (*Threats*)
   1. Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat;
   2. Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahui tentang SOP pelayanan;
   3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih;
   4. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang).

5. Formulasi isu–isu penting

Formulasi isu–isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasalahan, tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang direncanakan antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan mengikutsertakan aparatur pada bimtek dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait.
2. Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas melalui sosialisasi perundang–undangan kaitan dengan tugas dan fungsi aparatur.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan.
4. Penyusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan subbidang.
5. Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi kependudukan.
6. Meningkatkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan.
7. Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani pembuatan KTP, KK, perizinan, perpustakaan dan pelayan terpadu.
8. Dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di Kecamatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan rencana awal rencana kerja tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Tim penyusun Renja di tingkat kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada, terkait dengan apa saja yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan.

Melakukan koordinasi untuk merumuskan perencanaan tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap permasalahan yang ada dan merupakan prioritas untuk dilaksanakan.

Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan hal tersebut.

2. Alasan pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Dengan harapan, dimana dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar Kebutuhan

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana (Rp)	
	KECAMATAN				4.783.292.868	KECAMATAN				5.340.292.868	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Nagreg	Nilai AKIP	73	4.678.292.868	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Nagreg	Nilai AKIP	73	5.150.292.868	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	11.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	20.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	4.092.366.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	4.106.366.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/Bulan	4.092.366.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/Bulan	4.092.366.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat	100%	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100%	70.000.000	

			daerah yang tepat waktu								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 paket	30.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	10.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	40.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	100.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	170.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 paket	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 paket	15.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 paket	25.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	15.000.000,00	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	10.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakanjumlah surat kabar dan tabloit	3 dokumen	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakanjumlah surat kabar dan tabloit	3 dokumen	15.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Lap 167 Lap	60.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Lap 167 Lap	80.000.000,00	
		Kec.Nagreg	BMD dalam Kondisi baik/Laik				Kec.Nagreg	BMD dalam Kondisi baik/Laik			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Nagreg	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	35.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Nagreg	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	190.000.000	

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	60.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	
	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 nit	25.000.000,00	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 nit	90.000.000,00	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Lainnya yang Disediakan	Unit		pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Lainnya yang Disediakan	Unit		
	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Nagreg	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	369.926.868	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Nagreg	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	369.926.868	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	20.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DisediakanJumlah Orang bekerja/Bulan	11 Laporan	349.926.868,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DisediakanJumlah Orang bekerja/Bulan	11 Laporan	349.926.868,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Nagreg	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	60.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Nagreg	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	224.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Nagreg	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	5 unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kec.Nagreg	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	30.000.000	

			dan dibayarkan Pajaknya			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec.Nagreg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec.Nagreg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kec.Nagreg	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		Pemeliharaan Mebel	Kec.Nagreg	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Nagreg	JJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	40.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Nagreg	JJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	150.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Jumlah I	Kec.Nagreg			4.678.292.868	Jumlah I	Kec.Nagreg			5.150.292.868	472.000.000
		Kec.Nagreg	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				Kec.Nagreg	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Nagreg	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	84%	20.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Nagreg	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	84%	290.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Nagreg	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Nagreg	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	20.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	20.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Nagreg	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	%		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Nagreg	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	%	30.000.000	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	10.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	10.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah KecamatanJumlah Kegiatan	Laporan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah KecamatanJumlah Kegiatan	Laporan	10.000.000	

	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Nagreg	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	5.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Nagreg	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	20.000.000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	20.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Nagreg	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Nagreg	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	220.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	2.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	20.000.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang DilimpahkanJumlah Jenis Urusan	2 laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang DilimpahkanJumlah Jenis Urusan	2 laporan	200.000.000	
		Kec.Nagreg	Persentase Desa yang beradministrasi baik				Kec.Nagreg	Persentase Desa yang beradministrasi baik			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Nagreg	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina	100%	45.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Nagreg	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina	100%	130.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Nagreg	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	15.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Nagreg	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	60.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 LK	10.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 LK	20.000.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja KecamatanJumlah Kegiatan	Dokumen		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja KecamatanJumlah Kegiatan	Dokumen		

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Nagreg	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	30.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Nagreg	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	70.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 LK	10.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 LK	40.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 LK	10.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 LK	20.000.000,00	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 aporan	10.000.000,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 aporan	10.000.000,00	
		Kec.Nagreg	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				Kec.Nagreg	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Nagreg	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	20.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Nagreg	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Nagreg	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	10.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Nagreg	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	60.000.000	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	5.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	40.000.000,00	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh MasyarakatJumlah Kegiatan	2 laporan	5.000.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh MasyarakatJumlah Kegiatan	2 laporan	20.000.000,00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec.Nagreg	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	10.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec.Nagreg	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	40.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	40.000.000,00	

		Kec.Nagreg	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				Kec.Nagreg	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Nagreg	Persentase capaian Keberhasilan Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	44.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Nagreg	Persentase capaian Keberhasilan Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	164.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Nagreg	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	44.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Nagreg	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	164.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 rang	24.000.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 rang	24.000.000,00	

	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	50.000.000,00	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang		
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang		
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi	LK		Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	LK	30.000.000	

			berdasarkan Pancasila								
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	20.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	60.000.000,00	
		Kec.Nagreg	Persentase Desa yang beradministrasi baik				Kec.Nagreg	Persentase Desa yang beradministrasi baik			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Nagreg	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	40.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Nagreg	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	135.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Nagreg	persentase desa yang dibina	100%	40.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Nagreg	persentase desa yang dibina	100%	135.000.000	

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	20.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	20.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	30.000.000	
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan	Laporan		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan	Laporan		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat DesaJumlah Kegiatan	Dokumen		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat DesaJumlah Kegiatan	Dokumen		

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan DesaJumlah Kegiatan	Dokumen		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan DesaJumlah Kegiatan	Dokumen	15.000.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	50.000.000	
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen		
	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen		

	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan		
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan		
JUMLAH II					149.000.000					719.000.000	570.000.000
JUMLAH I+II					4.827.292.868					5.869.292.868	1.042.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan perundang–undangan bahwa usulan program kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan–usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah desa melalui Musrenbang desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas pembangunan di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan.

Musrenbang kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakilan dari desa dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang–bidang yaitu bidang sosial, budaya, bidang ekonomi dan bidang infrastruktur.

Dari hasil Musrenbang tersebut, akan didokumentasikan oleh tim Musrenbang kecamatan ke dalam daftar skala prioritas kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat kabupaten.

Tingkat kesesuaian usulan dari desa yang diusulkan melalui Musrenbang kecamatan, secara keseluruhan yaitu 60%, sesuai dengan isu–isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah. Namun, karena dibatasi kuota pagu anggaran kecamatan, usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan dan secara umum penyelenggaraan Musrenbang di tingkat kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa dan kecamatan.

Daftar skala prioritas kecamatan untuk di desa–desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk program kegiatan di kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam urusan rutin dan kewilayahan.

Adapun hasil kinerja yang merupakan *output* dan *outcome* dari program perencanaan daerah dengan kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh dinas teknis terkait.

Tabel 2.7 T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan
Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Nagreg

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	[redacted]				

Usulan tersebut dipilah dan tidak masuk pada Renstra dan Renja, tetapi usulan dari desa. Usulan tersebut diolah melalui musyawarah pembangunan di Kecamatan dan diusulkan melalui dinas teknis untuk disetujui masuk dalam Renja dinas teknis atau tidak dibiayai dari DPA kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung tahun 2026, dan usulan tersebut berdasarkan masalah daerah kabupaten yang ada di desa-desa di Kecamatan Nagreg.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NAGREG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik pada penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Peranan kecamatan sangat strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Yang akan menjadi telaahan dan acuan bagi Kecamatan Nagreg yang merupakan bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Bandung, sebagai landasan kebijakannya adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung dengan visi dan misi disesuikan dengan tugas dan fungsi kecamatan itu sendiri.

Tabel 3.1

Dukungan Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten dan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program Kecamatan
PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,	P4 Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	P13 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan Visi “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” Kecamatan Nagreg harus berkontribusi terhadap tercapainya visi tersebut dengan mengemban tugas misi no 3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”.

Kecamatan Nagreg sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kebijakannya tidak terlepas dari Renstra dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bandung dengan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025–2030 yaitu meningkatnya kualitas *e-government* melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah kebijakan peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik.

Guna mensukseskan kebijakan sebagaimana dalam RPJMD, selain melaksanakan kegiatan yang bersifat atributif dan delegatif sebagai pemegang mandatori kewenangan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat, selain membawa misi no 3, Kecamatan Nagreg harus memberikan kontribusi terhadap capaian misi lainnya dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat mendorong atau

memfasilitasi, mengkoordinasikan aspek kewilayahan untuk mendukung dinas/instansi lain dalam menjalan program kegiatan di wilayah Kecamatan Nagreg.

Fasilitasi dan koordinasi terutama terhadap bidang pendidikan, kesehatan dan program pembangunan lainnya dengan tujuan mendorong terhadap capaian IPM Kecamatan Nagreg guna berkontribusi capaian IPM Kabupaten Bandung.

Untuk mendukung terhadap kinerja pelayanan publik, kecamatan dituntut untuk melakukan inovasi diberbagai bidang terutama sesuai dengan tugas dan fungsinya agar layanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian kinerja perangkat daerah.

1. Prioritas Pembangunan Tahun 2026

   Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian visi dan misi, OPD kecamatan secara bersama melaksanakan misi dari Kabupaten Bandung dan kaitan dengan misi tersebut Kecamatan Nagreg melaksanakan program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang berkorelasi dan berorientasi pada visi dan misi Kabupaten Bandung sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang pada ketentuan perundang–undangan sebagai pelaksanaan tugas atributif dan delegatif sebagai kewenangan mandatori dari bupati kepada camat, sebagaimana Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep. 679 -TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdiri dari 16 Urusan dan 28 Kewenangan yang Dilimpahkan, dengan Jenis Pelimpahan antara lain: Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, Fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan.

A. Tujuan

Tujuan perangkat daerah Kecamatan Nagreg dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Peningkatan layanan publik di Kecamatan adalah merupakan hal harus disikapi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Selain layanan publik berupa kegiatan pelayanan publik paten, guna pelayanan administrasi yang dibutuhkan masyarakat, kecamatan harus melaksanakan program prioritas dan program Penunjang dan untuk meningkatkan layanan publik di Kecamatan dilakukan melalui advokasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap layanan public yang ada di kecamatan Nagreg.

Guna terwujudnya pelayanan yang baik, Kecamatan Nagreg dengan visi Pelayanan Publik yaitu "Terwujudnya Pelayanan yang Cepat, Efektif, Responsif, Dinamis, Akurat dan Santun", Adapun moto kecamatan yaitu "NAGREG CERDAS" ditunjang dengan misi pelayanan yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Cepat (sesuai dengan SOP).
2. Meningkatkan Pelayanan yang efektif (selesai sesuai ketentuan).
3. Meningkatkan Pelayanan yang Responsif.
4. Meningkatkan Pelayanan yang Dinamis (tanggap dan cepat terhadap kondisi yang ada).
5. Meningkatnya Pelayanan yang Akurat.
6. Mewujudkan Aparatur yang santun dalam melayani.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Sasaran–sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Adapun sasaran Renja Kecamatan Nagreg adalah sebagai berikut: **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan** Untuk mencapai sasaran tersebut Camat Nagreg telah

mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dan Monitoring evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Dengan monitoring dan evaluasi internal tersebut diharapkan kinerja Kecamatan Nagreg dapat terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan perencanaan, guna pencapaian target kinerja dan pengelolaan keuangan yang dalam penyerapannya dapat secara maksimal dan optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Selain monitoring dan evaluasi internal, Camat Nagreg telah melakukan upaya penegakan disiplin aparatur dan terus meningkatkan koordinasi, guna membangunan solidaritas kinerja pembangunan di Kecamatan Nagreg.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Nagreg Tahun 2026

Tujuan Kecamatan	Sasaran Kecamatan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		0,0052
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan		Nilai IKM	89,53 Poin

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Kecamatan Nagreg Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan					
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indek Reformasi Birokrasi 2. Indek Manajemen resiko			
1.1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		
1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	

1.1.4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.3			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu		
1.3.1			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.4			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal		
1.4.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	
1.4.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.4.3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1.4.4			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
1.4.5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakanjumlah surat kabar dan tabloit	
1.4.6			Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	

1.4.7			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.5			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.5.1			Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
1.5.2			pengadaan peralatan dan mesin lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
1.6			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.6.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.6.2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DisediakanJumlah Orang bekerja/Bulan	
1.7			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
1.7.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
1.7.2			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			JJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			

2.1			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
2.1.1			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
2.2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		
2.2.1			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	
2.2.2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	
2.2.3			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang DilimpahkanJumlah Jenis Urusan	
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina			
3.1			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		
3.1.1			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
3.1.2			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

3.2			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi		
3.2.1			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	
3.2.2			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
3.2.3			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum			
4.1			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
4.1.1			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.1.2			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh MasyarakatJumlah Kegiatan	
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Keberhasilan Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah			

5.1			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
5.1.1			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5.1.2			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi			
6.1			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase desa yang dibina		
6.1.1			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
6.1.2			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

1.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksaaan kebijakan dan program, senantiasa memperhatikan visi dan misi Kabupaten Bandung tahun 2025-2030.

Guna peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program/kegiatan/subkegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari misi yang diemban oleh Kecamatan Nagreg.

Adapun program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan visi dan misi Kabupaten Bandung, Kecamatan Nagreg dalam perencanaan tahun 2026 akan melaksanakan program secara efektif dan efisien.

Sebagai acuan dan gambaran mengenai perencanaan tahun 2025 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Nagreg dalam melaksanakan program dan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3 adalah merupakan suatu agenda kerja pemerintah Kecamatan Nagreg pada tahun 2026 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga camat beserta jajaran struktural sampai pada tingkat staff harus melakukan sebuah perjanjian kinerja, guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lan

Tabel 3.4 (TC. 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung

OPD : Kecamatan Nagreg

Kode Rekening						Urusan/Bidang/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						KECAMATAN								
						KECAMATAN NAGREG								
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip	Kec.Nagreg	78	5.485.154.678,00	APBD Kab		79 Point	4.775.259.392,00
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	100%	67.000.000,00	APBD Kab		100%	13.000.000,00
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD Kab		1 Dokumen	7.000.000,00
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Nagreg	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD Kab		1 Dokumen	1.500.000,00
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec.Nagreg	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD Kab		1 Dokumen	1.500.000,00

	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec.Nagreg	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD Kab		1 Dokumen	-
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Nagreg	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD Kab		1 Laporan	1.000.000,00
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec.Nagreg	1 Laporan	4.000.000,00	APBD Kab			1.000.000,00
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	1 Laporan	4.000.000,00	APBD Kab			1.000.000,00
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	100%	4.409.227.810,00	APBD Kab		100%	4.179.332.524,00
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Nagreg	26 Org/Bulan	4.401.727.810,00	APBD Kab		24 Orang/bulan	4.178.332.524,00
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Nagreg	1 Laporan	2.500.000,00	APBD Kab		1 Laporan	-
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec.Nagreg	1 Laporan	2.500.000,00	APBD Kab		1 Laporan	1.000.000,00

	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec.Nagreg	1 Dokumen	2.500.000,00	APBD Kab		1 Dokumen	-
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	100%	100.000.000,00	APBD Kab		100%	10.000.000,00
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Nagreg	37 paket	100.000.000,00	APBD Kab		24 Orang	10.000.000,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	Kec.Nagreg	37 Orang	115.000.000,00	APBD Kab		100%	105.000.000,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Nagreg	100%	5.000.000,00	APBD Kab		1 Paket	5.000.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Nagreg	17 paket	15.000.000,00	APBD Kab		1 Paket	15.000.000,00
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec.Nagreg	47 paket	5.000.000,00	APBD Kab		1 Paket	5.000.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Nagreg	10 paket	5.000.000,00	APBD Kab			2.000.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Nagreg	Paket	10.000.000,00	APBD Kab		1 Paket	10.000.000,00
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec.Nagreg	13 paket	10.000.000,00	APBD Kab		1 Dokumen	5.000.000,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Nagreg	3 dokumen	5.000.000,00	APBD Kab		1 Laporan	3.000.000,00

	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Nagreg	Laporan	60.000.000,00	APBD Kab		167 Laporan	60.000.000,00
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Nagreg	8 Lap 167 Lap	121.000.000,00	APBD Kab		1000	35.000.000,00
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			58.000.000,00			1 Unit	10.000.000,00
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Nagreg	100%	63.000.000,00	APBD Kab		3 Unit	25.000.000,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Nagreg	Unit	434.926.868,00	APBD Kab		100%	369.926.868,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Nagreg	Unit	35.000.000,00	APBD Kab		12 Laporan	20.000.000,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Nagreg	1 Paket	399.926.868,00	APBD Kab		11 Laporan	349.926.868,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	Kec.Nagreg	7 nit	238.000.000,00	APBD Kab		100%	63.000.000,00
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.Nagreg		35.000.000,00	APBD Kab		6 Unit	20.000.000,00
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Nagreg	Unit	3.000.000,00	APBD Kab		2 Unit	3.000.000,00
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Nagreg	Unit	200.000.000,00	APBD Kab		1 Unit	40.000.000,00

								Jumlah I	5.485.154.678,00					4.775.259.392,00
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Kec.Nagreg	89,20	416.500.000,00	APBD Kab		89,50 Persen	205.000.000,00
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Nagreg	Laporan	5.000.000,00	APBD Kab		100%	5.000.000,00
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Nagreg	12 laporan	5.000.000,00	APBD Kab		1 Dokumen	5.000.000,00
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	Kec.Nagreg		411.500.000,00	APBD Kab		100%	200.000.000,00
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Nagreg	11 Laporan	411.500.000,00	APBD Kab		1 Laporan	200.000.000,00
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec.Nagreg	100%	100.000.000,00	APBD Kab		100 Persen	55.000.000,00
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Nagreg	5 unit	10.000.000,00	APBD Kab		100%	10.000.000,00
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Nagreg	Unit	5.000.000,00	APBD Kab		1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00

	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Unit	5.000.000,00	APBD Kab		1 Laporan	5.000.000,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan	Kec.Nagreg	6 unit	35.000.000,00	APBD Kab		100%	35.000.000,00
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec.Nagreg		5.000.000,00	APBD Kab		1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec.Nagreg		10.000.000,00	APBD Kab		1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec.Nagreg		10.000.000,00			1 Laporan	10.000.000,00
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec.Nagreg	84%	10.000.000,00	APBD Kab		1 Laporan	10.000.000,00
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Nagreg	%	55.000.000,00	APBD Kab		100%	10.000.000,00
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec.Nagreg	Laporan	5.000.000,00	APBD Kab			1.000.000,00
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec.Nagreg	Dokumen	10.000.000,00	APBD Kab			1.000.000,00

	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec.Nagreg	%	10.000.000,00	APBD Kab			2.000.000,00
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec.Nagreg	Dokumen	10.000.000,00	APBD Kab			2.000.000,00
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec.Nagreg	Laporan	10.000.000,00	APBD Kab			2.000.000,00
	7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec.Nagreg	Laporan	10.000.000,00	APBD Kab			2.000.000,00
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Nagreg	100%	35.000.000,00	APBD Kab		100 Persen	35.000.000,00
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Nagreg	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD Kab		1000	25.000.000,00
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	100%	5.000.000,00	APBD Kab		1 Laporan	5.000.000,00

	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Nagreg	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD Kab		1 Laporan	20.000.000,00
0	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah	Kec.Nagreg	1 Laporan	10.000.000,00	APBD Kab		100%	10.000.000,00
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec.Nagreg	2 laporan	10.000.000,00	APBD Kab		1 Laporan	10.000.000,00
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Kec.Nagreg		74.000.000,00			100 Persen	44.000.000,00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Nagreg	100%	74.000.000,00	APBD Kab		100%	44.000.000,00
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Nagreg	100%	54.000.000,00	APBD Kab		150 Orang	24.000.000,00

	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Nagreg	6 LK	20.000.000,00	APBD Kab		1 Dokumen	20.000.000,00
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kec.Nagreg	Dokumen	51.000.000,00	APBD Kab		100 Persen	45.000.000,00
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Nagreg	1 Laporan	51.000.000,00	APBD Kab		100%	45.000.000,00
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Nagreg	100%	0,00	APBD Kab		1 Dokumen	6.000.000,00
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Nagreg	4 LK	21.000.000,00	APBD Kab		1 Dokumen	5.000.000,00
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Nagreg	5 LK	0,00	APBD Kab		1 Dokumen	5.000.000,00
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Nagreg	1 aporan	0,00	APBD Kab		1 Dokumen	4.000.000,00
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Nagreg		30.000.000,00			1 Dokumen	25.000.000,00
									Jumlah II	676.500.000				384.000.000
									Jumalah Total	6.161.654.678				5.159.259.392

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NAGREG

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Nagreg tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 yang telah dilampirkan pada Tabel 3.4 di BAB III pada halaman sebelumnya.

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai indikator kinerja tahun 2026 dengan capaian kinerja yang optimal sesuai dengan perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel 4.1
Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

Perangkat Daerah : Kecamatan Nagreg

Tujuan	Sasaran	Urusan/Bidang/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
		KECAMATAN						
		KECAMATAN NAGREG						
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip	Kec.Nagreg	78	5.485.154.678,00	APBD Kab	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	100%	67.000.000,00	APBD Kab	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD Kab	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Nagreg	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD Kab	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec.Nagreg	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD Kab	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec.Nagreg	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD Kab	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Nagreg	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD Kab	
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec.Nagreg	1 Laporan	4.000.000,00	APBD Kab	
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	1 Laporan	4.000.000,00	APBD Kab	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	100%	4.409.227.810,00	APBD Kab	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Nagreg	26 Org/Bulan	4.401.727.810,00	APBD Kab	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Nagreg	1 Laporan	2.500.000,00	APBD Kab	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec.Nagreg	1 Laporan	2.500.000,00	APBD Kab	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec.Nagreg	1 Dokumen	2.500.000,00	APBD Kab	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	100%	100.000.000,00	APBD Kab	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Nagreg	37 paket	100.000.000,00	APBD Kab	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal	Kec.Nagreg	37 Orang	115.000.000,00	APBD Kab	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Nagreg	100%	5.000.000,00	APBD Kab	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Nagreg	17 paket	15.000.000,00	APBD Kab	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec.Nagreg	47 paket	5.000.000,00	APBD Kab	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Nagreg	10 paket	5.000.000,00	APBD Kab	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Nagreg	Paket	10.000.000,00	APBD Kab	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec.Nagreg	13 paket	10.000.000,00	APBD Kab	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Nagreg	3 dokumen	5.000.000,00	APBD Kab	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Nagreg	Laporan	60.000.000,00	APBD Kab	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Nagreg	8 Lap 167 Lap	121.000.000,00	APBD Kab	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			58.000.000,00		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Nagreg	100%	63.000.000,00	APBD Kab	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Nagreg	Unit	434.926.868,00	APBD Kab	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Nagreg	Unit	35.000.000,00	APBD Kab	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Nagreg	1 Paket	399.926.868,00	APBD Kab	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah	Kec.Nagreg	7 nit	238.000.000,00	APBD Kab	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.Nagreg		35.000.000,00	APBD Kab	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Nagreg	Unit	3.000.000,00	APBD Kab	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Nagreg	Unit	200.000.000,00	APBD Kab	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Kec.Nagreg	89,20	416.500.000,00	APBD Kab	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Nagreg	Laporan	5.000.000,00	APBD Kab	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Nagreg	12 laporan	5.000.000,00	APBD Kab	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	Kec.Nagreg		411.500.000,00	APBD Kab	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Nagreg	11 Laporan	411.500.000,00	APBD Kab	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec.Nagreg	100%	100.000.000,00	APBD Kab	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Nagreg	5 unit	10.000.000,00	APBD Kab	

		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Nagreg	Unit	5.000.000,00	APBD Kab	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Unit	5.000.000,00	APBD Kab	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan	Kec.Nagreg	6 unit	35.000.000,00	APBD Kab	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec.Nagreg		5.000.000,00	APBD Kab	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec.Nagreg		10.000.000,00	APBD Kab	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec.Nagreg		10.000.000,00		
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec.Nagreg	84%	10.000.000,00	APBD Kab	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Nagreg	%	55.000.000,00	APBD Kab	
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec.Nagreg	Laporan	5.000.000,00	APBD Kab	
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec.Nagreg	Dokumen	10.000.000,00	APBD Kab	
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec.Nagreg	%	10.000.000,00	APBD Kab	

		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec.Nagreg	Dokumen	10.000.000,00	APBD Kab	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec.Nagreg	Laporan	10.000.000,00	APBD Kab	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec.Nagreg	Laporan	10.000.000,00	APBD Kab	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Nagreg	100%	35.000.000,00	APBD Kab	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Nagreg	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD Kab	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	100%	5.000.000,00	APBD Kab	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Nagreg	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD Kab	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah	Kec.Nagreg	1 Laporan	10.000.000,00	APBD Kab	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec.Nagreg	2 laporan	10.000.000,00	APBD Kab	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	Kec.Nagreg		74.000.000,00		

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Nagreg	100%	74.000.000,00	APBD Kab	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Nagreg	100%	54.000.000,00	APBD Kab	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Nagreg	6 LK	20.000.000,00	APBD Kab	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Kec.Nagreg	Dokumen	51.000.000,00	APBD Kab	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Nagreg	1 Laporan	51.000.000,00	APBD Kab	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Nagreg	100%	0,00	APBD Kab	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Nagreg	4 LK	21.000.000,00	APBD Kab	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Nagreg	5 LK	0,00	APBD Kab	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Nagreg	1 aporan	0,00	APBD Kab	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Nagreg		30.000.000,00		

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tahun 2026 merupakan dokumen Rancangan perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Rencana kerja tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada kebutuhan dan pertimbangan lain berdasarkan pengalaman atau riwayat pada tahun 2025 dengan demikian ada keselarasan antara prioritas kabupaten dengan prioritas Kecamatan Nagreg maupun nasional. Rencana awal ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Nagreg dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2026. Adapun hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan kantor Kecamatan Nagreg dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring internal secara rutin dan terus menerus diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung

Nagreg, Juli 2025

CAMAT NAGREG

Ttd

PERDANA FIRMANSYAH

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA